

**IMPLEMENTASI HUKUM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM
BIDANG KESEHATAN UNTUK MENINGKATKAN DERAJAT
KESEHATAN PEREMPUAN
(Studi di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas)**

Oleh

ARIEL APRIANTO

NIM : E1A020193

ABSTRAK

Pemberdayaan perempuan dalam bidang kesehatan merupakan salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kesetaraan gender dan juga salah satu hal yang paling krusial karena kesehatan perempuan bersifat khas dan kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implementasi hukum serta faktor yang cenderung memengaruhi implementasi hukum pemberdayaan perempuan dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan perempuan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Banyumas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan, yakni data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumenter. Data yang diperoleh diolah dengan cara reduksi dan kategorisasi data serta penyajian data dengan menggunakan teks naratif dan matriks kualitatif. Metode analisis yang digunakan adalah analisis konten dan analisis komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum pemberdayaan perempuan dalam bidang kesehatan di DPPKBP3A Kabupaten Banyumas telah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari baiknya perencanaan kegiatan pemberdayaan perempuan dalam bidang kesehatan; baiknya pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan dalam bidang kesehatan; dan baiknya monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan perempuan dalam bidang kesehatan. Faktor yang cenderung memengaruhi terdapat faktor pendukung yang meliputi, tersedianya aturan pelaksana; tersedianya sarana dan prasarana; adanya kesadaran berorganisasi masyarakat; adanya antusiasme perempuan untuk lebih berdaya dari sebelumnya; dan adanya sinergi dari berbagai unsur pemangku kepentingan. Faktor penghambat meliputi, kurang memadainya jumlah sumber daya manusia (SDM) dalam internal DPPKBP3A; kurang optimalnya ketersediaan dan akurasi data; dan masih adanya stigma buruk masyarakat dalam memandang program KB dan kesehatan reproduksi.

Kata kunci : *Implementasi Hukum; Kesehatan; Pemberdayaan Perempuan*

**LEGAL IMPLEMENTATION OF WOMEN'S EMPOWERMENT IN THE
HEALTH SECTOR TO IMPROVE WOMEN'S HEALTH STATUS**
*(Study at the Office of Population Control and Family Planning and Women's
Empowerment and Child Protection of Banyumas Regency)*

By

ARIEL APRIANTO
NIM: E1A020193

ABSTRACT

Women's empowerment in the health sector is one of the efforts to increase gender equality and is also one of the most crucial things because women's health is unique and complex. This study aims to review and analyze the legal implementation and factors that tend to affect the legal implementation of women's empowerment in the health sector to improve the degree of women's health in the Population Control and Family Planning and Women's Empowerment and Child Protection (DPPKBP3A) Office of Banyumas Regency. This research is qualitative research with an empirical juridical approach. The types and sources of data used, namely primary data and secondary data. The data collection method was carried out by interviews, literature studies, and documentary studies. The data obtained was processed using data reduction and categorization and data presentation using narrative text and qualitative matrix. The analysis methods used are content analysis and comparative analysis. The results of the study show that the legal implementation of women's empowerment in the health sector in the DPPKBP3A of Banyumas Regency has been going well, this can be seen from the good planning of women's empowerment activities in the health sector; the good implementation of women's empowerment activities in the health sector; and the good monitoring and evaluation of women's empowerment activities in the health sector. Factors that tend to affect supporting factors include implementing rules; availability of facilities and infrastructure; community organizational awareness; the enthusiasm of women to be more empowered than before; and the synergy of various stakeholder elements. Inhibiting factors include the inadequate number of human resources within the DPPKBP3A; less optimal data availability and accuracy; and the bad stigma still in the community regarding family planning programs and reproductive health.

Keywords: Legal Implementation; Health; Women's Empowerment